

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gedung DPRD

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintahan dari anggota Dewan Legislatif dalam bentuk bangunan. Aktivitas kegiatan tersebut berhubungan dengan dua unsur yaitu Kelembagaan Eksekutif dengan masyarakat dimana keduanya mempengaruhi tugas dan wewenang dari anggota Dewan Legislatif tersebut. Hubungan DPR dengan Lembaga Pemerintahan merupakan hubungan kerja yang berkait dengan wewenang DPR sebagai pengontrol Pemerintah (Lembaga Eksekutif), sedangkan hubungan dengan masyarakat merupakan hubungan tugas dari DPR sebagai penampung aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada Pemerintah. Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan dua unsur tersebut merupakan pembentuk dari fungsi bangunan itu sendiri.

1.1.2 Gedung DPRD Tk II Kulon Progo

Gedung DPRD Tk II Kulon Progo terletak di jalan Perwakilan bersebelahan dengan gedung Pemerintahan. Dalam perkembangannya gedung tersebut dinilai tidak representative lagi atau tidak dapat mewakili status gedung tersebut sebagai wadah aktivitas anggota Dewan Legislatif. Daerah, ketidak sesuaian tersebut dipengaruhi oleh :

1.1.2.1 Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Anggota Dewan

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan agenda kerja dewan legislatif mempunyai pengaruh besar dalam sitem tata pemerintahan dimana masyarakat sendiri menjadi pengontrol dari jalannya pemerintahan yang secara sistimatis diwakili oleh kewenangan anggota DPR.. Peran masyarakat yang tercermin dalam kegiatan pemerintahan merupakan wujud dari perlunya wadah yang merespon sistim tersebut, kebutuhan atas ruang yang mewadahi peran masyarakat pada pelaksanaan agenda kerja DPR haruslah menjadi

perhatian pada terciptanya suatu objek fisik pemerintahan seperti, perlunya ruang tambahan bagi wadah kegiatan persidangan yang mengikutsertakan peran langsung dari masyarakat.

1.1.2.2 Pengaruh Sistem Pemerintahan Reformasi

Pada masa pemerintahan reformasi berbagai perubahan dilakukan dari sistem, sistim sampai unsur-unsur pemerintahan, terlebih lagi setelah dikeluarkannya UU Otonomi Daerah yang memberi dampak pada setiap daerah untuk mengembangkan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Hal ini memberi dampak akan banyaknya perubahan pada tata pemerintahan khususnya daerah yang berujung pada bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Aktifitas dari pelaksanaan tugas tersebut merupakan salah satu bentuk yang harus direspon oleh bangunan sebagai wadah gerak penggunaannya seperti tuntutan ruang pada bangunan gedung DPR Kulon Progo yang memerlukan objek fisik berupa ruang yang merespon pada kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan, seperti ruang demonstrasi dan orasi, ruang dialog baik in door maupun out door ataupun ruang-ruang lain yang merupakan respon fisik bangunan terhadap tuntutan sistem pemerintahan tersebut.

1.1.2.3 Ketidak Sesuaian antara Kebutuhan dan Kapasitas Ruang

Perubahan pada sistim kerja di Gedung DPRD Kulon Progo merupakan fungsi yang harus direspon dengan wadah yang dapat mendukung aktifitas kegiatan di dalamnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dimana pada bangunan gedung DPRD Kulon Progo tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atas kegiatan dan aktifitas dewan ditinjau dari nilai kebutuhan dan kapasitas ruang. Respon pada terciptanya ruang yang sesuai dengan aktifitas kegiatan dan ruang gerak pengguna merupakan jawaban dari kebutuhan akan wadah gedung DPRD Kulon Progo yang baru seperti terbatasnya ruang pada bagian staff yang hanya dibagi dalam 3 ruang dengan luas total 50 m² untuk menampung aktifitas 40 orang, terbatasnya ruang sidang, hall, ruang fraksi, ruang pers dan sebagainya merupakan wadah fungsi yang harus dibenahi.

1.1.3 Ekspresi dan Identitas Wilayah sebagai Latar Belakang Arsitektural

Dalam merencanakan bangunan Gedung DPRD Kulon Progo diperlukan pengungkapan suatu gambaran untuk mewujudkan tampilan bangunan agar dapat dimengerti pesan-pesan dan makna yang akan diperlihatkan, gambaran tersebut hendaklah berupa cerminan dari latar belakang yang didasari pada fungsi, peran bangunan terhadap pemakai dan lingkungan. Bangunan yang diakui sebagai arsitektur yang bagus adalah bangunan yang memuat sejumlah komunikasi kedalam totalitas dan mengekspresikannya secara ringkas, tepat dan indah,¹ opini dari Frederik A Jules tersebut menegaskan bahwa perwujudan pesan dan makna dari bangunan dapat diperlihatkan dengan ekspresi.

Akan tetapi perencanaan dan perancangan suatu bangunan tidak hanya berupa pengungkapan ekspresi saja tetapi juga diperlukan suatu unsur yang dapat memberikan jati diri dan identitas terhadap bangunan agar pengungkapan ekspresi tidak merusak tatanan lingkungan sekitar seperti bentuk bangunan tanpa dasar. Eko Budiarjo berpendapat bahwa Identitas itu tidak sekedar perlu tetapi amat sangat dibutuhkan sebagai pegangan handal bagi setiap perencana bangunan,² hal itu menegaskan bahwa suatu rancangan bangunan juga harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar termasuk bangunan, adat dan tradisi masyarakat sekitar.

1.1.3.1 Aplikasi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan sebagai Ekspresi Bangunan

Bentuk aktifitas merupakan sesuatu yang selayaknya menjadi cerminan bagi sebuah bangunan, bentuk sangat mempengaruhi citra bangunan, karena merupakan suatu media atau alat komunikasi untuk menyampaikan arti yang dikandung atau menyampaikan pesan tertentu.³ Aktifitas kegiatan dari tugas dan wewenang DPR terhadap masyarakat dan pemerintah eksekutif menjadi sebuah dasar bentuk aplikasi dari fungsi bangunan tersebut, sehingga bentuk tersebut akan menggambarkan dan mengekspresikan identitas bangunan dari fungsinya. Tugas dan Wewenang DPR sebagai manifestasi dari aktifitas kegiatannya merupakan dasar dari

¹ Frederik A. Jules, *Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur*, Introdution of Arsitek, 1994, hal

² Budiarjo, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 31

³ Y.B. Mangunwijaya, *Wastu Citra*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

ekspresi citra **Keterbukaan** dan **Kewibawaan** yang terwujud dari pengungkapan fungsi bangunan yang bersifat terbuka dan wibawa.

Keterbukaan merupakan suatu arti yang disampaikan melalui citra atau kesan terhadap bangunan dimana arti tersebut menggambarkan nilai dari tugas DPR secara sistematis sebagai objek yang diwadahi, yaitu perumusan dari kesan menerima dan transparan kepada masyarakat. Sifat keterbukaan merupakan ekspresi watak dari tugas dewan Legislatif yang disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran pelaku dalam menjalankan tugasnya.

Kewibawaan adalah suatu arti kata yang identik dengan kekuasaan, kebesaran, ataupun kekuatan. Gambaran tersebut merupakan ide yang disampaikan untuk menunjukkan kekuasaan DPR terhadap pemerintah eksekutif sebagai pengawas jalannya pemerintahan yang kedudukannya diatas pemerintahan eksekutif. Citra Kewibawaan pada bangunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pesan yang mengekspresikan kekuatan objek yang diwadahi.

Citra Keterbukaan dan Kewibawaan merupakan gambaran dari kesan yang dibentuk dengan gaya arsitektur baru yang terungkap dari penerapan fungsi terbuka dan wibawa, ekspresi tersebut merupakan nilai lebih yang dihadirkan secara umum terhadap bangunan karena masih dapat diterapkan kedalam bangunan lain pada fungsi yang sama.

1.1.3.2 Aplikasi Bangunan Tradisional sebagai Simbol Identitas dan Jati Diri Bangunan.

Bangunan Tradisional sebagai salah satu manifestasi dari sosial budaya masyarakat merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan arsitektur karena merupakan identitas atau jati diri yang melekat dan menjadi sukma arsitektur yang khas disetiap daerah, sepantasnyalah dijadikan bekal utama landasan berpijak dalam perencanaan dan perancangan arsitektur yang baru.⁴ Makna dari wawasan identitas adalah menggali keunikan, kekhasan, karakter dan potensi setempat dengan segala kearifan tradisional untuk diejawantahkan kembali dalam penampilan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, bukan sttus quo.⁵ Oleh sebab itu bangunan DPRD Kulon Progo haruslah tetap

⁴ Budiarto, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 13

⁵ Ibid, hal 30

berpegang dan berdasar pada karakter bangunan tradisional setempat sebagai landasan Identitas wilayah yang mungkin dapat dijadikan nilai lebih secara khusus karena hanya dapat diterapkan pada bangunan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1951 yang berisi tentang penggabungan dua wilayah kekuasaan yaitu Kasultanan dan Paku Alaman yang menjadi satu daerah pemerintahan dalam wilayah Kulon Progo⁶. Dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo memiliki dua unsur pembentuk pemerintahan yang dalam tinjauan budayanya berasal dari satu sumber yaitu Kasultanan. Dalam pendekatan pada arsitektur tradisional kedua wilayah tersebut masuk dalam spesifikasi bangunan Jawa Wilayah Tengah yaitu meliputi daerah Karisidenan Surakarta dan sekitarnya termasuk daerah Kasultanan Yogyakarta.

1.1.4 Manifestasi Citra dan Identitas ke dalam Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan pada aplikasi citra gedung DPRD Kulon Progo dan Bangunan Tradisional setempat sebagai Identitas Wilayah di daerah Yogyakarta-Kulon Progo merupakan perwujudan dari perencanaan dan perancangan arsitektur pada bangunan tersebut yang mencerminkan tuntutan latar belakang dari gedung DPRD dan Wilayahnya. Pengungkapan kesan dan identitas menjadi tinjauan dari tuntutan tersebut dengan memperhatikan pada fungsi yaitu aktifitas kegiatan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan anggota DPR, pengaruh sistem pemerintahan reformasi dan kebutuhan akan ruang pada gedung yang baru serta karakter bangunan joglo sebagai perwakilan identitas wilayah.

Citra Keterbukaan dan Kewibawaan pada dasarnya berupa makna dari kesan yang tanpa ada standar atau batasan yang jelas, bangunan tradisional Kulon Progo digunakan sebagai pendekatan dari kesan terbuka dan wibawa yang akan diangkat sebagai dasar ekspresi bangunan gedung DPRD Kulon Progo dimana keterbukaan dan Kewibawaan menurut tatanan dan aturan bangunan Joglo yang diejawantahkan kedalam bangunan Gedung DPR tersebut.

⁶ Tim, Binangun, Media Informasi dan Komunikasi Pemda Tk II Kulon Progo, 1996, hal 9

Arsitektur tradisional Jawa harus dilihat sebagai totalitas pernyataan hidup yang bertolak dari tatakrama menempatkan diri, norma dan tata nilai manusia Jawa dengan segala kondisi alam dan lingkungannya.⁷ Penggalan dan pengungkapan esensi yang menjiwai bangunan tersebut dimaksudkan agar kita tidak terperangkap pada bentuk fisik dan luarnya saja sehingga perwujudan Identitas Wilayah dan Jati Diri bangunan akan lebih bersifat luas tidak hanya simbolik saja. Beberapa esensi arsitektur Jawa yang sering digunakan adalah tata krama menempatkan diri, arsitektur sebagai proses organik, kejujuran struktur dan bahan, ruang dalam dan luar yang saling mengimbas dan sebagainya,⁸ contoh diatas merupakan esensi yang mungkin dapat diterapkan pada pengolahan citra Keterbukaan dan Kewibawaan sebagai tinjauan dari makna tersebut sebagai aplikasi bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Permasalahan Umum

Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagai kantor DPRD Kulon Progo sebagai wadah yang memiliki kesan Terbuka terhadap lingkungan sekitar dan mampu memperlihatkan Kewibawaannya sebagai dewan Legislatif yang memiliki wewenang dan kekuasaan tetapi tetap menunjukkan Identitas Wilayah dengan bangunan Tradisionalnya sebagai simbol daerah.

1.2.2 Permasalahan Khusus

Bagaimana mewujudkan penampilan bangunan DPRD Kulon Progo yang mengekspresikan citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan kontekstual pada bangunan Tradisional yang sesuai dengan budaya daerah tersebut serta pengolahan ekspresi bangunan yang terbentuk dari fungsi dan estetik bangunan.

⁷ Budiarjo, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1987, hal 12

⁸ Ibid, hal 10

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Mewujudkan rencana dan rancangan bangunan yang berfungsi sebagai Gedung DPRD Kulon Progo yang mengekspresikan kesan terbuka dan wibawa menurut makna ruang bangunan Tradisional setempat yang diaplikasikan pada perencanaan arsitektur baru dengan citra Keterbukaan dan Kewibawaan yang mengekspresikan fungsi dan tetap kontekstual dengan identitas wilayah setempat.

1.3.2 Sasaran

Bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo yang dimanifestasikan dalam kesan Keterbukaan dan Kewibawaan pada perancangan arsitektur baru sebagai bentuk penampilan bangunan pada:

- a. Identifikasi karakteristik fungsi dan peran DPR
- b. Identifikasi besaran dan organisasi ruang terhadap kegiatan
- c. Identifikasi sirkulasi antar hubungan ruang
- d. Identifikasi karakter elemen yang sesuai dengan vasade dan masa bangunan
- e. Identifikasi pada kesan keterbukaan dan kewibawaan yang dibentuk
- f. Identifikasi terhadap bangunan tradisional setempat.

1.4 Batasan Dan Lingkup Pembahasan

1.4.1 Batasan

Pembahasan dibatasi pada masalah pengolahan sistem tata ruang dan penampilan bangunan yang mampu mengungkapkan ekspresi kesan secara komunikatif pada vasade dan masa bangunan terhadap citra Keterbukaan dan Kewibawaan serta paduan unsur bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.4.2 Lingkup Pembahasan

1.4.2.1 Lingkup Non-arsitektural

Bahasan Lingkup non-arsitektural dibatasi pada :

- a. Makna Keterbukaan dan Kewibawaan pada bangunan Tradisional Kulon Progo
yaitu bagaimana penilaian makna keterbukaan dan kewibawaan menurut orang Jawa di dasarkan pada bentuk ruang dan penampilannya terhadap bangunan Tradisional Kulon Progo
- b. Tata Krama, Norma dan Adat Masyarakat Jawa
yaitu bagaimana tata karma, norma dan adat masyarakat Jawa dalam menerapkan kesan terbuka dan wibawa pada bangunan.

1.4.2.2 Lingkup Arsitektural

Pembahasan mengenai aspek-aspek pembentuk penampilan bangunan dengan kesan keterbukaan dan kewibawaan sebagai factor penentu :

- a. Pembahasan mengenai penampilan fisik bangunan dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan
yaitu bagaimana bentuk penampilan bangunan yang dapat menggambarkan kesan terbuka dan wibawa dengan perwujudan fungsi dan perpaduan elemen bangunan.
- b. Elemen-elemen penyusun dan sistem peruangan yang sesuai dengan bangunan Tradisional setempat.
yaitu bagaimana karakter bangunan Tradisional yang sesuai dengan budaya masyarakat Kulon Progo dapat disesuaikan dengan bangunan baru.

1.5 Metode Pengambilan Data

1.5.1 Tahap Pencarian Data

a. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan mencari data secara langsung melalui :

1. Pengamatan langsung pada kondisi lokasi, tapak dan lingkungan sekitar
2. Wawancara

b. Studi Literatur

1. Mempelajari pengertian dan fungsi bangunan pemerintahan gedung DPR, fasilitas yang diwadahi dan tuntutan ruang
2. Mempelajari pengertian penampilan bangunan

c. Mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan

d. Mempelajari bangunan Tradisional Kulon Progo dan pemaknaan pada bentuk ruang dan penampilannya.

1.6 Metode Pembahasan

1.6.1 Diskriptif

Dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran pembahasan topik.

1.6.2 Analisis

Analisa dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

- a. Analisa bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa kebutuhan, besaran ruang serta tuntutan ruang baru.
- b. Analisa arsitektural dalam kaitannya dengan penentuan penampilan bangunan gedung DPR dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan sebagai aplikasi dari bentuk

dan makna ruang bangunan tradisional setempat, analisa perbandingan pada bangunan yang mempunyai fungsi sejenis.

- c. Kesimpulan dari hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam perencanaan dan perancangan.

1.6.3 Sintesa

Rumusan sebagai tahap untuk mendapatkan konsep bangunan DPR yang meliputi aspek pembentuk penampilan bangunan dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan yang diaplikasikan terhadap bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, permasalahan yang diungkapkan, tujuan dan sasaran, metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM DAN KHUSUS

Menelaah tinjauan pada bangunan gedung DPR dan aktivitas pengguna, bentuk bangunan tradisional setempat sebagai identitas wilayah, serta tinjauan khusus ekspresi komunikatif dalam perwujudan bangunan, studi komperasi dan analisis dalam pengolahan tata ruang dan penampilan bangunan.

BAB III ANALISA PERMASALAHAN

Mengungkapkan prinsip dasar ruang pada arsitektur dalam mempengaruhi aktifitas penggunaanya, serta pengupasan ekspresi terhadap citra yang diinginkan dalam pengolahan dan perwujudannya kedalam bentuk fisik agar visual dapat dibaca, dimengerti dan dapat diserap pesan-pesan yang disampaikan.

BAB IV PENDEKATAN DAN KONSEP DESAIN

Berisikan pendekatan pemilihan lokasi, pendekatan program ruang, pendekatan arsitektur dan pendekatan sistem bangunan. Dan membahas implementasi dari hasil analisis yang dibuat, melalui konsep dasar perencanaan dan perancangan tapak, ruang dalam dan ruang luar serta sistem bangunan.

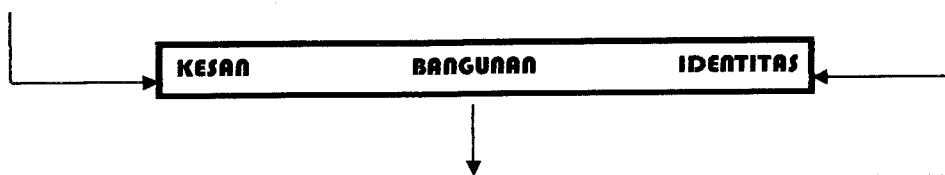
1.8 Keaslian Penulisan

1. Ery Susandah, TA/ UII/ 1994
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II MUSI BANYU ASIN SELAYU SUMSEL
Landasan Konseptual Perancangan
2. Samsul Má arif, TA/ UII/ 1996
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II TEGAL
Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan
3. Muhammad Nur Hidayat, TA/ UII/ 1996
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II TEMANGGUNG
Sebagai Wadah Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan
4. Joko Susanto, TA/ UII/ 2000
GEDUNG BALAI KOTA DI KOTA ADMINISTRATIF TANJUNG
Dengan Pendekatan Desain Bioklimat
5. Ressy Herpani, TA/ UII/ 2000
RELOKASI KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH TK II SUKABUMI
Optimalisasi dan Keterpaduan Pelayanan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah

Kesimpulan :

Perbedaan pada penulisan di atas dengan penulisan yang akan dilakukan adalah pada jenis bangunan atau fungsi bangunan dan penekanan atau pokok permasalahan yaitu, pada penulisan yang diangkat adalah bangunan yang berfungsi sebagai bangunan Gedung DPR dan penekanan pada *Penerapan Citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan Kontekstual pada Arsitektur Bangunan Tradisional Kulon Progo*

- Tugas dan Wewenang sebagai aktifitas dewan Legislatif
- Tuntutan masyarakat thd pelayanan anggota Dewan
- Pengaruh Sistem Pemerintahan Reformasi
- Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas ruang
- Tuntutan akan perlunya Ekspresi dalam Bangunan
- Tuntutan Identitas dan Jati Diri pada Bangunan



- ▶ Perlunya citra bgn sbg wadah yg berkesan
Terbuka dan Wibawa
- ▶ Perlunya Arsitektur yang Kontektual dengan bangun-
an tradisional setempat

Penerapan permasalahan umum dim
Penampilan Bangunan

- ▶ Tinjauan pada bangunan DPR
- ▶ Aktifitas kegiatan anggota DPR
- ▶ Data Studi Survei
- ▶ Data Teoritikal yg berkaitan dgn tata ruang dan
penampilan bangunan

- ▶ Studi Literatur ttg kesan dan citra
- ▶ Tinjauan peruangan Bangunan Tradisional
- ▶ Tinjauan pada Makna bangunan Tradisional

- ▶ Analisa bentuk bangunan DPRD, Analisa ruang, Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang, Analisa tuntutan ruang baru
- ▶ Analisa arsitektural, pada penampilan bangunan dengan pendekatan pada fungsi dan makna bangunan tradisional

Hasil dari analisa yang menjadi pedoman bagi pendekatan **KONSEP DASAR**

**Pengolahan Tata Ruang dan Penampilan Bangunan melalui Ekspresi Kesan dgn aplikasi
Pada ruang serta fungsi ruang Bangunan Tradisional setempat**

Diagram Pola Pikir